

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 jajaran pulau-pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke (BIG, 2018). Indonesia juga merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (PRB, 2013). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 261.890.872 jiwa. Angka tersebut lebih tinggi sekitar 1,2% atau bertambah sebanyak 3.185.886 jiwa dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 258.704.986 jiwa (BPS RI, 2018).

Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk *Muslim* terbesar di dunia (Republika, 2018). Menurut Mulawarman (2016), pada tahun 2016 jumlah pemeluk Islam secara global naik signifikan, namun di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk *Muslim* terbesar di dunia persentasenya malah menurun dari 95 persen menjadi 85 persen. Walaupun demikian, Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah penduduk *Muslim* terbesar di dunia meskipun Indonesia bukan negara Islam (Saifuddin, 2015).

Indonesia adalah negara maritim yang terdiri atas pulau-pulau dan memiliki 34 Provinsi (Kemendagri, 2012). Delapan diantaranya adalah Provinsi Kepulauan, yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara (Raya, 2017). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil (Babelprov, 2018). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 104<sup>0</sup>50' sampai 109<sup>0</sup>30' Bujur Timur dan 0<sup>0</sup>50' sampai 4<sup>0</sup>10' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah Sebelah Barat: Selat Bangka, Sebelah Timur: Selat Karimata, Sebelah Utara: Laut Natuna, dan Sebelah Selatan: Laut Jawa (Katalog BPS Bangka Belitung, 2015).

**Tabel. I.1 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kota/Kabupaten Tahun 2014-2017**

Wilayah	2014	2015	2016	2017
Bangka	304.485	311.085	317.735	324.305
Belitung	171.271	175.048	178.721	182.418
Bangka Barat	192.395	196.598	200.684	204.778
Bangka Tengah	177.218	180.903	184.720	188.603
Bangka Selatan	189.492	193.583	197.670	201.782
Belitung Timur	117.026	119.394	121.971	124.587
Pangkalpinang	191.994	196.202	200.326	204.392
Kepulauan Bangka Belitung	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865

Sumber: Data BPS Bangka Belitung Diolah Peneliti, 2018

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat banyak, yaitu sebesar 81,83% (Kemendagri, 2018). Dengan jumlah penduduk yang selalu mengalami peningkatan hingga empat tahun terakhir, dimana hal ini dapat terlihat pada tabel. I. 1, yaitu pada tahun

2014 sebesar 1.343.881 jiwa, tahun 2015 sebesar 1.372.813 jiwa, tahun 2016 sebesar 1.401.827, dan tahun 2017 sebesar jiwa dan pada tahun 2017 sebesar 1.430.865 jiwa (BPS Bangka Belitung, 2018).

Dengan jumlah penduduk yang sangat padat, Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam katagori negara berkembang (IMF, 2016). Kondisi ini menjadikan Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kemiskinan (Parawansa, 2016). Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan serius yang tengah dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini (Alisjahbana, 2012). Pada tiga tahun terakhir ini angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 28.513.570 jiwa atau 11,13%, tahun 2016 sebesar 27.764.320 atau 10,7%, dan tahun 2017 sebesar 26.582.990 jiwa atau 10,12% (BPS RI, 2018).

Penurunan angka kemiskinan secara nasional saat ini dapat terbuktikan dengan menurunnya juga angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 (BPS Bangka Belitung, 2018). Pada tabel. I.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 mencapai 72,76 ribu orang atau 5,22%. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 74,09 ribu orang atau 5,40%. Itu artinya, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 1,33 ribu orang atau persentasenya turun sebesar 0,18% jika dibandingkan tahun 2015.

**Tabel. I.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kota/Kabupaten Tahun 2014-2016 (Ribuan Jiwa)**

Wilayah	2014		2015		2016	
	Penduduk (org)	%	Penduduk (org)	%	Penduduk (org)	%
Bangka	16	5,20	17,39	5,63	17,29	5,52
Belitung	12,70	7,36	14,58	8,38	13,94	7,85
Bangka Barat	6,10	3,15	6,01	3,08	5,46	2,74
Bangka Tengah	9,40	5,27	10,19	5,67	10,36	5,64
Bangka Selatan	7,40	3,87	7,20	3,74	7,11	3,62
Belitung Timur	7,90	6,68	8,71	7,33	8,48	6,99
Pangkalpinang	7,80	4,04	10,02	4,97	10,12	5,02
Kepulauan Bangka Belitung	67,20	4,97	74,09	5,40	72,76	5,22

Sumber: Data BPS Bangka Belitung Diolah Peneliti, 2018

Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia melalui implementasi berbagai program kerja, diantaranya melalui kebijakan pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar, peningkatan efektivitas program Bidik Misi, penataan asistensi sosial, dan perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, serta integrasi data kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial (Nota Keuangan, 2017). Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai kegiatan ekonomi secara luas dan program-program yang diarahkan untuk secara khusus mengentaskan kemiskinan telah menghasilkan penurunan jumlah orang miskin, walaupun dengan laju penurunan yang relatif lambat (Alisjahbana, 2012).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berkomitmen untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini sebagaimana yang terlihat dari klausul MoU KUA PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2018 berupa adanya penetapan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) Bangka Belitung tahun 2018 yang harus mengacu pada penekanan angka kemiskinan pada kisaran 4,42% (Djohan, 2017).

Untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pemerintah perlu menerapkan strategi-strategi pendukung yang tepat dan baik untuk menghadapi masalah yang bakal timbul dari kemiskinan itu sendiri (Sofyan, 2012). Walaupun masalah kemiskinan tidak akan pernah terhapuskan, namun kemiskinan bukan berarti harus dibiarkan, karena kemiskinan itu disinyalir dapat menimbulkan berbagai kejahatan sosial dan ketidakbaikan (Maipita, 2014). Naiknya angka kemiskinan menjadi hal yang harus diantisipasi, karena berkaitan erat dengan peningkatan angka kriminalitas, serta keterbatasan lapangan pekerjaan membuat orang rentan melakukan kejahatan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Wibowo, 2018). Melihat problematika ini, sudah sepantasnya untuk memperhatikan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam, yakni dengan optimalisasi *zakat*, mengingat potensi *zakat* yang ada di negeri ini cukup besar (Amalia, 2016). *Zakat* adalah salah satu instrumen awal yang dieksplorasi oleh para sarjana Muslim dan pemerhati bidang keuangan publik yang mana penghimpunan dan pendistribusian potensi *zakat* merupakan instrumen pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) yang selama bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam (Jaelani, 2015). Beberapa studi empirik sudah membuktikan dampak *transfer of income* dan *transfer of wealth* dana *zakat* dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, dimana temuan menunjukkan

bahwa *zakat* menjadi alat yang sangat efisien dan layak dalam mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin (Muhammad dan Abubakar, 2011).

**Gambar. I.1 Potensi *Zakat* Nasional Terhadap PDB Tahun 2011**

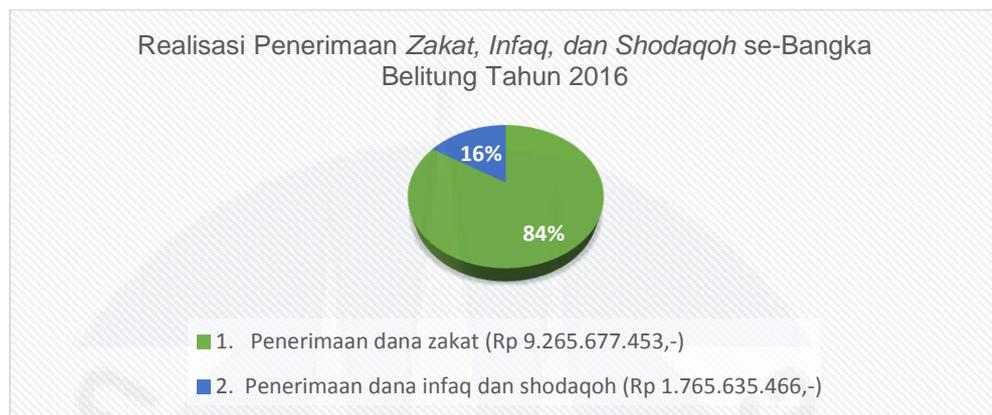


Sumber: Data Riset BAZNAS dan FEM IPB Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) pada tahun 2011 potensi *zakat* secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40% dari total Produk Domestik Bruto (Majalah *Zakat*, 2013). Pada gambar. I.1 dapat diketahui bahwa grafik menunjukkan potensi *zakat* nasional diklasifikasikan menjadi empat kelompok besar yaitu pertama, potensi *zakat* rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi *zakat* industri swasta (menengah dan besar) secara nasional. Ketiga, potensi *zakat* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara nasional. Keempat, potensi *zakat* tabungan secara nasional. Jumlah dan persentase dari masing-masing kelompok dapat dilihat pada gambar. I.1 dimana potensi terbesar berasal dari *zakat* industri swasta dan *zakat* rumah tangga.

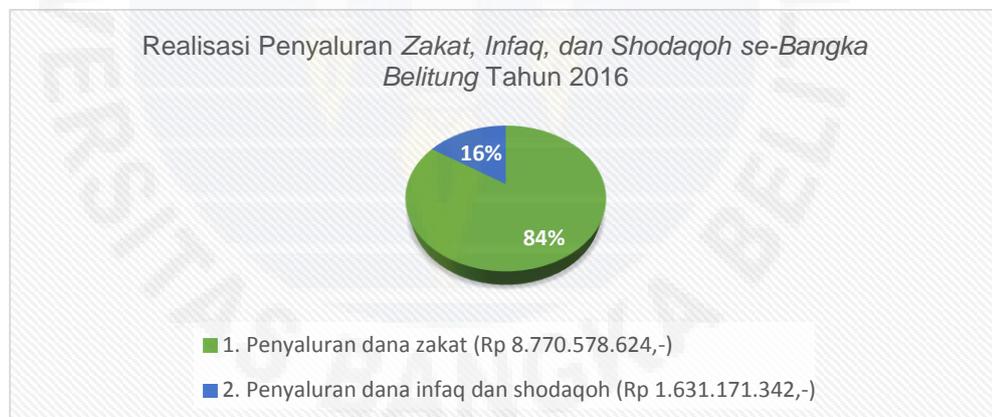
Potensi *zakat* di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat besar sekali mengingat jumlah penduduk *Muslim* yang sangat banyak, yaitu sebesar 81,83% (Kemendagri, 2018).

**Gambar. I.2 Realisasi Penerimaan *Zakat, Infaq, dan Shodaqoh* se-Bangka Belitung Tahun 2016**



Sumber: Data BAZNAS Bangka Belitung Diolah Peneliti, 2018

**Gambar. I.3 Realisasi Penyaluran *Zakat, Infaq, dan Shodaqoh* se-Bangka Belitung Tahun 2016**



Sumber: Data BAZNAS Bangka Belitung Diolah Peneliti, 2018

Pada gambar. I.2 dan gambar. I.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016, dana *Zakat, Infaq, dan Shodaqoh* (ZIS) yang terkumpul se-Bangka Belitung sebesar Rp 11.031.312.919,- dan dana ZIS yang tersalurkan sebesar Rp 10.401.749.966,-.

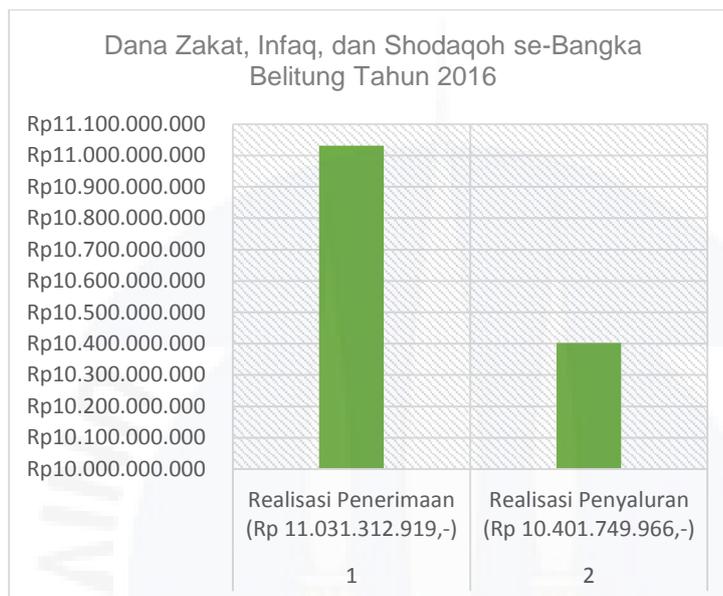
Hal yang sangat penting dalam pengelolaan *zakat* adalah peranan dari *amil zakat* selaku perantara penerimaan dan penyaluran dana *zakat* pada masyarakat (FOZ, 2018). *Amil zakat* sebagai pilar utama dalam pengelolaan *zakat* tentu harus memenuhi kualifikasi tertentu yang tidak sama dengan pekerjaan pada perusahaan atau lembaga keuangan yang bukan pengelola *zakat* dan harus *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan, dan tidak pula sambilan (Hafidhuddin, 2011). Keberhasilan *zakat* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatan dana *zakat* serta amanahnya pengelola *zakat* tersebut dalam menyalurkannya (Umar, 2016).

Berdasarkan penelitian data terdahulu pada tahun 2011 bahwa potensi *zakat* nasional mencapai Rp 217 triliun (Majalah Zakat, 2013). Namun, yang baru terkumpul hanya 0,2 persen atau Rp 6 triliun per tahun (Tohor, 2018). Masalah pengelolaan *zakat* ini di banyak negara Islam termasuk Indonesia adalah potensi *zakat* yang dapat dikumpulkan kurang maksimal (Mulyani, 2017). Pada tahun 2016, penghimpunan *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum bisa akan mencapai target 100 persen yang mana target pengumpulannya Rp 20,75 miliar (Amran, 2016).

Pada gambar. I.4 terlihat bahwa penerimaan dana ZIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 mencapai Rp 11.031.312.919,- sedangkan untuk penyalurannya hanya sebesar Rp 10.401.749.966,-. Terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan dana ZIS dengan penyalurannya sebesar

Rp 629.562.953,-. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal.

**Gambar. I.4 Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh se-Bangka Belitung Tahun 2016**



Sumber: Data BAZNAS Bangka Belitung Diolah Peneliti, 2018

Di Indonesia, pengelolaan *zakat* telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan *Zakat*, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan *Zakat Mal* dan *Zakat Fitrah* Serta Pendaaygunaan *Zakat* Untuk Usaha Produktif, serta Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 Tentang Pedoman Pengumpulan dan *Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI, 2016). Berdasarkan semua

peraturan yang telah disebutkan, sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik yaitu sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik untuk memudahkan melakukan efisiensi dan efektivitas sebagai aspek kinerja yang akan diaudit (Katalog Kemenag RI, 2013).

Pengertian umum efisiensi adalah menekan biaya serendah mungkin untuk meningkatkan keuntungan, sedangkan secara luas pengertian efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan (*input*) dan hasil (*output*), antara keuntungan dan sumber-sumber yang dipergunakan, serta hasil maksimal yang dicapai dengan menggunakan sumber yang terbatas (Marbun, 2010). Efisiensi merupakan bagian dari evaluasi kinerja yang perlu dilakukan untuk membantu operasi atau proses usaha menjadi lebih produktif dan efisien yang diidentifikasi dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis* (Zhu, 2014). Beberapa peneliti nasional maupun internasional telah menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengukur efisiensi lembaga *zakat*, seperti Wahyuni (2016), Lestari (2015), Nurhasanah dan Lubis (2017), Akbar (2009), Al Parisi (2017), Syahadah (2017), dan Wulandari (2014) yang dalam penelitian mereka menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengukur efisiensi lembaga *zakat* di Indonesia. Wahab dan Abdul (2012) dan Djaghballou *et al.*, (2017) yang juga dalam penelitian mereka mengukur efisiensi lembaga *zakat* di Malaysia dan Aljazair dengan menggunakan teknik analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA). Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan,

menunjukkan bahwa metode non-parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi kinerja lembaga *zakat*. Dimana melalui metode ini diharapkan dapat mengetahui OPZ mana yang telah efisien dalam hal penggunaan (*input*) dan pengeluaran (*output*).

Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah objek studi dan tahun yang diteliti. Penelitian ini lebih difokuskan pada BAZNAS Kota dan Kabupaten di Pulau Bangka, dengan pertimbangan berdasarkan nilai rasio keuangan yang telah dicapai dalam hal penggunaan biaya dan penghimpunan dana *zakat*.

**Tabel. I.3 Efisiensi Keuangan BAZNAS Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017**

No.	BAZNAS Kota/Kabupaten	Rasio Efisiensi Keuangan			
		OER	FEXR	FEFR	PRR
1	BAZNAS Kota Pangkalpinang	29,18%	0,96%	0,14%	86,53%
2	BAZNAS Kabupaten Bangka	23,50%	0,35%	0,05%	70,42%
3	BAZNAS Kabupaten Bangka Tengah	22,50%	0,43%	0,06%	70,11%
4	BAZNAS Kabupaten Bangka Selatan	32,97%	2,32%	0,22%	81,49%
5	BAZNAS Kabupaten Bangka Barat	0%	0%	0%	66,50%
6	BAZNAS Kabupaten Belitung Timur	21,70%	0%	0%	92,90%
7	BAZNAS Kabupaten Belitung	36,79%	30,35%	3,65%	94,84%

Sumber: Data BAZNAS Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Diolah Peneliti, 2018

Pada tabel. I.3 terlihat bahwa kinerja keuangan BAZNAS Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikatakan sangat efisien dalam hal penggunaan biaya operasional dan biaya penghimpunan dana ZIS. Hal ini terlihat dari persentase masing-masing rasio, yaitu OER (*operational expenses ratio*), FEXR (*fundraising expenses ratio*), dan FEFR (*fundraising efficiency ratio*) yang secara keseluruhan memiliki nilai di bawah 60%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, menjelaskan bahwa kriteria efisiensi keuangan terbagi atas beberapa kategori, yaitu 1) Jika nilai rasio di atas 100, maka tidak efisien, 2) Jika nilai rasio berada pada rentang 90–100, maka kurang efisien, 3) Jika nilai rasio berada pada rentang 80–90, maka cukup efisien, 4) Jika nilai rasio berada pada rentang 60–80, maka efisien, 5) Jika nilai rasio berada di bawah 60, maka sangat efisien.

Khusus untuk PRR (*primary revenue ratio*) menunjukkan persentase yang berbeda-beda dari setiap BAZNAS Kota dan Kabupaten, dimana nilai kinerja keuangan yang baik dalam penghimpunan dana *zakat* dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan nilai yang rendah dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Bangka, BAZNAS Kabupaten Bangka Tengah, dan BAZNAS Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan standar penilaian dari Pusat Ekonomi dan Busines Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS FE UI) (2009), untuk konversi nilai kinerja keuangan khusus penghitungan rasio pendapatan utama dari dana *zakat* terbagi menjadi beberapa kriteria, yaitu 1) Jika nilai rasio di bawah 70, maka mencerminkan kinerja keuangan yang buruk, 2) Jika nilai rasio berada pada rentang 70-74,99, maka mencerminkan kinerja keuangan yang kurang baik, 3) Jika nilai rasio berada pada rentang 75-79,99, maka mencerminkan kinerja keuangan yang cukup baik, 4) Jika nilai rasio berada pada rentang 80-84,99,

maka mencerminkan kinerja keuangan yang baik, dan 5) Jika nilai rasio berada di atas 84,99, maka mencerminkan kinerja keuangan yang sangat baik.

Pada tabel. I.3 di atas terlihat bahwa BAZNAS Kota Pangkalpinang, BAZNAS Kabupaten Bangka, BAZNAS Kabupaten Bangka Tengah, BAZNAS Kabupaten Bangka Selatan, dan BAZNAS Kabupaten Bangka Barat telah efisien dalam menggunakan biaya untuk mengelola dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*. Hal ini terlihat bahwa rasio biaya operasional (OER) masing-masing BAZNAS adalah sebesar 29,18% untuk BAZNAS Kota Pangkalpinang, 23,50% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka, 22,50% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka Tengah, 32,97%, untuk BAZNAS Kabupaten Bangka Selatan dan 0% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kelima BAZNAS telah berhasil mencapai efisiensi dalam kegiatan operasionalnya yang ditunjukkan dengan proporsi biaya operasional yang kecil terhadap keseluruhan biaya yang dikeluarkan.

Rasio biaya penghimpunan dana ZIS (FEXR) masing-masing BAZNAS adalah sebesar 0,96% untuk BAZNAS Kota Pangkalpinang, 0,35% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka, 0,43% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka Tengah, 2,32% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka Selatan dan 0% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kelima BAZNAS dalam melakukan penghimpunan dana ZIS tidak memakan banyak biaya tapi berhasil menghimpun dana ZIS dengan jumlah yang banyak.

Rasio efisiensi penghimpunan dana ZIS (FEFR) masing-masing BAZNAS adalah sebesar 0,14% untuk BAZNAS Kota Pangkalpinang, 0,05% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka, 0,06% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka Tengah, 0,22% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka Selatan dan 0% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kelima BAZNAS telah mencerminkan efisiensi OPZ dalam penghimpunan dana ZIS.

Rasio pendapatan utama dari dana *zakat* (PRR) masing-masing BAZNAS adalah sebesar 86,53% untuk BAZNAS Kota Pangkalpinang, 70,42% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka, 70,11% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka Tengah, 81,49% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka Selatan dan 66,50% untuk BAZNAS Kabupaten Bangka Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kelima OPZ telah berusaha secara maksimal untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga *zakat*, yaitu menghimpun dana *zakat* dari *muzakki*.

Kelima OPZ ini dipilih sebagai objek penelitian karena dianggap telah efisien dalam menggunakan biaya dan telah optimal dalam menghimpun dana *zakat*. BAZNAS Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tidak penulis pilih karena keterbatasan dalam akses pengambilan data penelitian. Selanjutnya kelima OPZ ini akan dilihat tingkat efisiensinya berdasarkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), apakah mencapai pada tingkat efisiensi sempurna atau 100% sebagaimana hasil pengukuran

dengan menggunakan rasio keuangan lembaga *zakat* yang menunjukkan hasil yang efisien.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut seberapa efisien BAZNAS Kota dan Kabupaten di Pulau Bangka dalam mengalokasikan *input* untuk menghasilkan *output* berdasarkan metode DEA. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan BAZNAS Kota dan Kabupaten di Pulau Bangka Tahun 2017: Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum variabel *input* dan *output* Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) Kota dan Kabupaten di Pulau Bangka pada tahun 2017?
2. Bagaimana rasio kinerja keuangan Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) Kota dan Kabupaten di Pulau Bangka pada tahun 2017?
3. Bagaimana tingkat efisiensi Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) Kota dan Kabupaten di Pulau Bangka dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) pada tahun 2017?
4. Wilayah manakah yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi dan terendah pada Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) Kota dan Kabupaten di Pulau Bangka pada tahun 2017?

### 1.3 Batasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan dapat menjaga kemungkinan penyimpangan yang terjadi serta adanya keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka penulis memberikan batasan-batasan penelitian yaitu:

1. Penelitian ini akan mengukur efisiensi kinerja keuangan BAZNAS Kota Pangkalpinang, BAZNAS Kabupaten Bangka, BAZNAS Kabupaten Bangka Tengah, BAZNAS Kabupaten Bangka Selatan, dan BAZNAS Kabupaten Bangka Barat tahun 2017.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada BAZNAS Kota Pangkalpinang, BAZNAS Kabupaten Bangka, BAZNAS Kabupaten Bangka Tengah, BAZNAS Kabupaten Bangka Selatan, dan BAZNAS Kabupaten Bangka Barat tahun 2017.
3. Penelitian ini dilakukan untuk periode 2017. Pertimbangannya adalah periode tersebut masih baru dan relevan untuk diteliti serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun laporan keuangannya berdasarkan Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan *Zakat*.
4. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode non-parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) yaitu dalam pengolahan data melibatkan variabel *input* dan variabel *output*. Variabel *input* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biaya personalia, biaya sosialisasi, dan biaya operasional. Variabel

*output* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerimaan dana ZIS (*Zakat, Infaq, dan Shadaqah*) dan penyaluran dana ZIS.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum variabel *input* dan *output* Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) Kota dan Kabupaten di Pulau Bangka pada tahun 2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis rasio kinerja keuangan Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) Kota dan Kabupaten di Pulau Bangka pada tahun 2017.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi kinerja keuangan Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) Kota dan Kabupaten di Pulau Bangka pada tahun 2017 dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).
4. Untuk mengetahui wilayah manakah yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi dan terendah pada BAZNAS Kota dan Kabupaten di Pulau Bangka pada tahun 2017.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Secara umum kegunaan hasil penelitian ada dua macam, yaitu kegunaan teoritis untuk mengembangkan ilmu dan kegunaan praktis untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek

yang diteliti (Sugiyono, 2015). Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

1. Bagi mahasiswa Jurusan Manajemen, sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Bagi peneliti berikutnya, untuk memperkaya wawasan pengetahuan, melengkapi, dan memberi informasi yang berharga mengenai manajemen pengelolaan *zakat* yang efisien. Selain itu, sebagai bahan referensi bagi para peneliti lain untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan terkait efisiensi OPZ (Organisasi Pengelola *Zakat*) di Indonesia.
3. Bagi penulis, penelitian ini untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya manajemen pengelolaan *zakat* dalam mengukur tingkat efisiensi lembaga pengelola *zakat* dengan menggunakan metode terkait pengukuran efisiensi.

b. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi yang berguna bagi Organisasi Pengelola *Zakat* (OPZ) dalam hal melakukan evaluasi kinerja keuangannya agar pengelolaan *Zakat, Infaq,*

dan *Shodaqoh* (ZIS) dapat berjalan lebih efisien dan lebih mensejahterakan *Ummat*.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat lebih mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang konsep efisiensi, konsep *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*, dan penjelasan tentang BAZNAS yang menjadi dasar acuan teori bagi penelitian ini serta memuat hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan hipotesis. Pada sub bab hasil penelitian menguraikan tentang deskripsi populasi dan sampel, deskripsi variabel, dan hasil analisis data.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian. dan saran.

